



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Analisis Standar Belanja merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa Analisis Standar Belanja merupakan metode pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.

4. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Sanggau selaku pengguna anggaran dan atau pengguna barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II BATASAN, MANFAAT DAN TUJUAN ASB

Pasal 2

ASB dalam Peraturan Bupati ini merupakan salah satu kelengkapan dalam penyusunan anggaran dan merupakan suatu pendekatan dasar untuk menilai kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan oleh SKPD dalam melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 3

Manfaat ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. sebagai bahan pertimbangan TAPD untuk mengevaluasi kewajaran belanja dan menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas RKA-SKPD yang diusulkan setiap SKPD;
- b. sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. sebagai bahan untuk meminimalisir inefisiensi anggaran serta memberikan kemudahan dalam penentuan anggaran yang didasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- d. untuk memudahkan dalam penentuan besaran alokasi anggaran yang objektif.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan efektif.

BAB III
RUANG LINGKUP ASB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. deskripsi kegiatan;
 - b. persamaan penghitungan total belanja kegiatan; dan
 - c. batasan alokasi rincian obyek belanja.
- (2) Ruang lingkup ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Deskripsi Kegiatan

Pasal 6

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan pengertian, penjelasan, dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Penerapan ASB dalam penyusunan RKA-SKPD disesuaikan dengan model ASB sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga
Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan

Pasal 7

- (1) Persamaan Penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total pagu belanja yang dianggarkan untuk masing-masing kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok dengan karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan.

Bagian Keempat
Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja

Pasal 8

- (1) Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berisikan rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada rincian belanja dari tiap kegiatan.

- (3) Penambahan rincian obyek uraian tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan prosentase jumlah rupiah yang melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan TAPD.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Terhadap kegiatan tertentu yang secara teknis tidak dapat dinilai kewajarannya, maka tidak berlaku ketentuan ASB dalam Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a) kegiatan fisik dengan menggunakan rencana anggaran dan biaya;
- b) kegiatan yang telah diatur standar biayanya dengan peraturan lain; atau
- c) kegiatan yang sudah ada standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang diatur dalam peraturan lain.

Pasal 10

Dalam hal terjadi inflasi atau perubahan standar satuan biaya, maka ASB dalam Peraturan Bupati ini akan disesuaikan atau dilakukan perubahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 24 November 2017

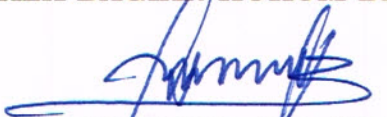
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS. SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 76 TAHUN 2017
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2017
 TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

**DESKRIPSI, MODEL DAN VARIABEL PENGENDALI
 BELANJA (COST DRIVER) ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

ASB 1.01 DIKLAT

Deskripsi Kegiatan:

DIKLAT merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan peserta yang mengikuti baik dari instansi pemerintah maupun umum masyarakat.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Peserta dengan lama hari

Y = 172,063,559.4 + 276,080.26 X

- Pengendali belanja (cost driver): Peserta dengan lama hari
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 172,063,559.4 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan DIKLAT (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 172,063,559.4
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 276,080.26 Peserta dengan lama hari. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 276,080.26 untuk setiap jumlah peserta diklat dan setiap jumlah hari.

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata- Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	3,99%	1,53%	6,45%
2.	Honorarium Non PNS	0,97%	0,37%	1,56%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,57%	0,99%	4,15%
4.	Belanja Bahan/Material	4,23%	1,62%	6,83%
5.	Belanja Jasa Kantor	21,29%	8,18%	34,41%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,02%	1,16%	4,88%
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,41%	0,16%	0,66%
8.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16,89%	6,49%	27,30%
9.	Belanja Makanan dan Minuman	20,26%	7,78%	32,75%
10.	Belanja Perjalanan Dinas	10,40%	3,99%	16,80%
11.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3,43%	1,32%	5,54%
12.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	10,04%	3,86%	16,23%
13.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2,34%	0,90%	3,77%
14.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,16%	0,06%	0,27%
JUMLAH		100,00%	38,40%	161,60%

Contoh Kegiatan ASB 1.01

No	Satker	Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA
2	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Diklat Calon Pengawas Sekolah
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang Sekolah Dasar
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Diklat Kurikulum 2013 Jenjang Sekolah Dasar
5	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA
6	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Diklat Calon Pengawas Sekolah
7	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pelatihan Karang Taruna Bidang Usaha Ekonomi Produktif dengan Stimulan Bantuan Bahan Modal Usaha
8	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Pelatihan Bagi Pengelolaan Keuangan Desa
9	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Pelatihan Akuntansi Koperasi
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan manajemen bagi PNS Daerah
11	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (PASKIBRA dan DRUM BAND)
12	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
13	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Tanaman Anggrek
14	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Pelatihan Pengendalian Hama terpadu PHT Perkebunan
15	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna
16	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Pelatihan Pengendalian Hama terpadu PHT Perkebunan
17	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pelatihan Karang Taruna Bidang Managemnt Organisasi
18	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Pelatihan Akuntansi Koperasi
19	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (PASKIBRA dan DRUM BAND)
20	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Pelatihan Manajemen dan Administrasi Pemdes
21	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Pelatihan Bagi Pengelolaan Keuangan Desa

No	Satker	Kegiatan
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan manajemen bagi PNS Daerah

ASB 1.02 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL

Deskripsi Kegiatan:

DIKLAT FORMAL merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan Dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah yang bersifat formal. Kegiatan tersebut dilaksanakan peserta yang mengikuti adalah dari instansi pemerintah.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

$$Y = 44,325,635.4 + 5,047,864.05 X$$

Pengendali belanja (cost driver):

$$X = \text{Jumlah peserta dengan lama hari}$$

- Pengendali belanja (cost driver): Peserta dengan lama hari
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 44,325,635.4 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 44,325,635.4
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 5,047,864.05 Peserta dengan lama hari. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 5,047,864.05 untuk setiap jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Formal dan setiap jumlah hari.

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut:

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Belanja Perjalanan Dinas	37,07%	17,73%	56,42%
2.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	62,93%	30,09%	95,76%
JUMLAH		100,00%	47,82%	152,18%

Contoh Kegiatan ASB 1.02

No	Satker	Kegiatan
1	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pendidikan dan Pelatihan Teknis
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan formal
3	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pendidikan dan pelatihan teknis
4	SEKRETARIAT KORPRI	Pendidikan dan pelatihan formal

No	Satker	Kegiatan
5	KECAMATAN MUKOK	Pendidikan dan pelatihan formal
6	KECAMATAN MELIAU	Pendidikan dan pelatihan formal
7	KECAMATAN ENTIKONG	Pendidikan dan pelatihan formal
8	KECAMATAN BONTI	Pendidikan dan pelatihan formal
9	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan formal
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pendidikan dan pelatihan formal
11	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pendidikan dan pelatihan formal
12	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Pendidikan dan pelatihan formal
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Bimbingan teknis / pelatihan aparatur
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pendidikan dan Pelatihan Teknis
16	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan formal
17	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (PASKIBRA dan DRUM BAND)
18	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pendidikan dan pelatihan formal
19	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Pendidikan dan pelatihan formal
20	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Pendidikan dan pelatihan formal
21	SEKRETARIAT KORPRI	Pendidikan dan pelatihan formal
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pendidikan dan pelatihan formal
23	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pendidikan dan pelatihan formal
24	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan formal
25	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pendidikan dan pelatihan formal
26	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Pendidikan dan pelatihan formal
27	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pendidikan dan Pelatihan Teknis
28	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pendidikan dan pelatihan formal
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Bimbingan teknis / pelatihan aparatur
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan formal
31	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pendidikan dan pelatihan formal
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

No	Satker	Kegiatan
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Pendidikan dan pelatihan manajemen bagi PNS Daerah

ASB 1.03 BIMTEK

Deskripsi Kegiatan:

BIMTEK merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tanpa memberikan fasilitas menginap kepada peserta.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah peserta dari lembaga yang didampingi dan Durasi bimbingan teknis

Y = 24,843,298.02 + 651,588.48 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta dari lembaga yang didampingi dan Durasi bimbingan teknis
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 24,843,298.02 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 24,843,298.02
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 651,588.48 Peserta Dan Durasi waktu. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 651,588.48 untuk setiap jumlah peserta BIMTEK dan setiap Durasi waktu yang digunakan .

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	6,02%	2,38%	9,66%
2.	Honorarium Non PNS	0,45%	0,18%	0,72%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,58%	1,42%	5,74%
4.	Belanja Bahan/Material	4,79%	1,90%	7,68%
5.	Belanja Jasa Kantor	17,66%	6,99%	28,33%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,01%	1,99%	8,04%
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,39%	0,15%	0,62%
8.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17,19%	6,81%	27,57%
9.	Belanja Makanan dan Minuman	17,15%	6,79%	27,51%
10.	Belanja Perjalanan Dinas	11,81%	4,68%	18,94%
11.	Belanja sewa perleengkapan dan peralatan	0,14%	0,05%	0,22%
12.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	8,07%	3,20%	12,94%
13.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7,75%	3,07%	12,42%
JUMLAH		100,00%	39,59%	160,41%

Contoh Kegiatan ASB 1.03

No	Satker	Kegiatan
1	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Bimtek Pemilihan Kepala Desa
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Bimtek Bendaharawan
3	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Bimtek Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro
4	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Bimtek Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
5	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Kegiatan Bimtek Pengelola Kearsipan
6	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Bimtek Penulisan Karya Tulis Ilmiah
7	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Kegiatan Bimtek Pengelola Kearsipan
8	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Bimtek Kewirausahaan Bagi Usaha Mikro
9	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Bimtek Pembentukan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
10	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Bimtek Penulisan Karya Tulis Ilmiah
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Pasar
12	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
13	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan
14	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan

ASB 1.04 FASILITAS KEGIATAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA

Deskripsi Kegiatan:

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain (kelompok bersama) untuk mempermudah tugas /kegiatan merupakan proses yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi kegiatan tingkat kecamatan dan desa dalam satu tahun anggapan atau periode.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (hari/kegiatan)

Y = 59,151,395.7 + 276,367.63 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (hari/kegiatan)
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 59,151,395.7 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan FASILITAS KEGIATAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 59,151,395.7

- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 276,367.63 Orang/Peserta dan periode waktu kegiatan. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 276,367.63 untuk setiap jumlah peserta Fasilitas Kegiatan Tingkat Kecamatan Dan Desa dan setiap jumlah hari.

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut:

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNSD	16,84%	7,69%	25,99%
2.	Honorarium Non PNS	1,65%	0,75%	2,55%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,78%	1,27%	4,29%
4.	Belanja Bahan/Material	0,60%	0,28%	0,93%
5.	Belanja Jasa Kantor	15,17%	6,93%	23,42%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,94%	1,35%	4,54%
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,45%	0,66%	2,23%
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,76%	0,35%	1,18%
9.	Belanja Makanan dan Minuman	11,98%	5,47%	18,48%
10.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1,92%	0,88%	2,96%
11.	Belanja Perjalanan Dinas	30,07%	13,73%	46,41%
12.	Belanja Sewa Perlengkapan , Peralatan Kantor dan	11,92%	5,44%	18,39%
13.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	1,91%	0,87%	2,94%
JUMLAH		100,00%	45,67%	154,33%

Contoh Kegiatan ASB 1.04

No	Satker	Kegiatan
1	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi penyelesaian konflik- konflik pertanahan
2	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Kegiatan Bidang Pertanian Kabupaten Sanggau
3	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Sistem Informasi Posyandu
4	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasiltasi Penentuan Batas Desa
5	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Peningkatan Kadarkum Masyarakat
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
9	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi penyelesaian konflik- konflik pertanahan
10	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah

No	Satker	Kegiatan
11	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kegiatan Bidang Pertanian Kabupaten Sanggau
12	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan
13	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
14	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kegiatan Bidang Pertanian Kabupaten Sanggau
15	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Sistem Informasi Posyandu
16	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Penentuan Batas Desa
17	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Kegiatan Kota Layak Anak
18	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kesatuan Gerak PKK - KB - Kesehatan
19	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
20	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
21	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi
22	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Lansia
23	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Kesatuan Gerak PKK - KB - Kesehatan
24	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Fasilitasi Pokja AMPL

ASB 1.05 ASB FASILITASI KEMASYARAKATAN

Deskripsi Kegiatan:

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain (kelompok bersama) untuk mempermudah tugas /kegiatan merupakan proses yang bersifat kemasyarakatan dalam satu tahun anggapan atau periode.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (kegiatan)

Y = 15,057,557.5 + 354,082.37 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (hari/kegiatan)
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 15,057,557.5 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan FASILITASI KEMASYARAKATAN (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 15,057,557.5.

- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) := Rp 354,082.37 Orang/Peserta dan periode waktu kegiatan. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 354,082.37 untuk setiap jumlah peserta Fasilitasi Kemasyarakatan dan setiap jumlah hari

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut:

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNSD	6,37%	2,53%	10,21%
2.	Honorarium Non PNS	6,59%	2,61%	10,57%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,18%	0,87%	3,50%
4.	Belanja Bahan/Material	3,33%	1,32%	5,34%
5.	Belanja Jasa Kantor	26,73%	10,60%	42,86%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,08%	0,82%	3,33%
7.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	2,73%	1,08%	4,37%
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,35%	0,54%	2,16%
9.	Belanja Makanan dan Minuman	11,61%	4,60%	18,61%
10.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4,02%	1,60%	6,45%
11.	Belanja Perjalanan Dinas	15,44%	6,12%	24,76%
12.	Belanja Sewa Perlengkapan , Peralatan Kantor dan	2,81%	1,11%	4,50%
13.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5,81%	2,30%	9,31%
14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	0,82%	0,33%	1,32%
15.	Belanja Barang Yang Akan DiSerahkan Kepada	8,14%	3,23%	13,05%
JUMLAH		100,00%	39,66%	160,34%

Contoh Kegiatan ASB 1.05

No	Satker	Kegiatan
1	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari keluarga Nasional
2	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Lomba Desa/Kelurahan
3	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Fasilitasi Penyelenggaraan POR Sosek malindo
4	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Fasilitasi Penyelenggaraan Titian Muhibah
5	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Lomba Cipta Lagu Anak-anak Kabupaten Sanggau
6	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI)

No	Satker	Kegiatan
7	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
8	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Sosialisasi Program Kependudukan Indonesia
9	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Hari Anak Nasional
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi Hari Ibu
11	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Lomba Desa/Kelurahan
12	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Lomba P2WKSS
13	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di Kab.Sanggau
14	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Fasilitasi Kegiatan Festival Keraton Tayan
15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Fasilitasi Kegiatan Gawai Dayak, Paraje dan MABT Kab.Sanggau
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Fasilitasi Penyelenggaraan Bintang Radio
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

ASB 1.06 FASILITAS PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA

Deskripsi Kegiatan:

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain (kelompok bersama) untuk mempermudah tugas /kegiatan merupakan proses yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi pembinaan dan penpeningkatan kapasitas dan pemberdayaan desa dalam satu tahun anggaran atau periode.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (kegiatan)

Y = 79,918,535.3 + 299,513.41 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (hari/kegiatan)
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 79,918,535.3 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan FASILITAS PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 79,918,535.3

- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 299,513.41 Orang/Peserta dan periode waktu kegiatan. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 299,513.41 untuk setiap jumlah peserta Fasilitas Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Desa dan setiap jumlah hari.

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNSD	15,50%	4,86%	26,14%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,05%	0,95%	5,14%
3.	Belanja Jasa Kantor	13,78%	4,32%	23,24%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,75%	1,17%	6,32%
5.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3,05%	0,96%	5,14%
6.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1,70%	0,53%	2,87%
7.	Belanja Makanan dan Minuman	10,00%	3,14%	16,87%
8.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,15%	0,05%	0,25%
9.	Belanja Perjalanan Dinas	46,73%	14,65%	78,82%
10.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	2,30%	0,72%	3,87%
JUMLAH		100,00%	31,35%	168,65%

Contoh Kegiatan ASB 1.06

No	Satker	Kegiatan
1	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Fasilitasi Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
2	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
3	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Fasilitasi Pembinaan/Raker Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
4	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
5	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Pembinaan PKK Desa dan Kelurahan
6	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kebijakan Pembinaan Usaha
7	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Pemekaran Desa, Dusun dan Kelurahan
8	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

No	Satker	Kegiatan
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasiltasi Penentuan Batas Desa
10	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Pngkatan Kapasitas Pelaku Pendampingan Desa dalam Tata Kelola Dana Desa
11	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa
12	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Pemberdayaan Desa Fokus
13	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kebijakan Pembinaan Usaha
14	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Fasilitasi Aliansi Pemberdayaan LKM/Pokdarwis Desa Wisata
15	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kesehatan Masyarakat
16	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa
17	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Kesehatan Masyarakat

ASB 1.07 FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Deskripsi Kegiatan:

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain (kelompok bersama) untuk mempermudah tugas /kegiatan merupakan proses yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi pembinaan dan pengendalian keuangan desa dalam satu tahun anggapan atau periode.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (kegiatan)

Y = 57,788,822.1 + 33,028.34 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (hari/kegiatan)
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 57,788,822.1 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 57,788,822.1
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 33,028.34 Orang/Peserta dan periode waktu kegiatan. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 33,028.34 untuk setiap jumlah peserta Fasilitasi Pembinaan Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa dan setiap jumlah hari.

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut:

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNSD	56,54%	32,93%	80,15%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,62%	0,36%	0,87%
3.	Belanja Makanan dan Minuman	11,40%	6,64%	16,15%
4.	Belanja Perjalanan Dinas	31,45%	18,32%	44,58%
JUMLAH		100,00%	58,25%	141,75%

Contoh Kegiatan ASB 1.07

No	Satker	Kegiatan
1	KECAMATAN TOBA	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
2	KECAMATAN TAYAN HULU	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
3	KECAMATAN TAYAN HILIR	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
4	KECAMATAN SEKAYAM	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
5	KECAMATAN PARINDU	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
6	KECAMATAN NOYAN	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
7	KECAMATAN MUKOK	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
8	KECAMATAN MELIAU	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
9	KECAMATAN KEMBAYAN	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
10	KECAMATAN KAPUAS	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
11	KECAMATAN JANGKANG	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
12	KECAMATAN ENTIKONG	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
13	KECAMATAN BONTI	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
14	KECAMATAN BALAI	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa

ASB 1.08 FASILITAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PUBLIK**Deskripsi Kegiatan:**

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain (kelompok bersama) untuk mempermudah tugas /kegiatan merupakan proses yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan publik guna peningkatan kesejahteraan dalam satu tahun anggaran atau periode.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (kegiatan)

$$Y = 82,851,735.7 + 86,865.13 X$$

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (kegiatan)
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 82,851,735.7 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan FASILITAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PUBIK (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 82,851,735.7
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 86,865.13 Orang/Peserta dan periode waktu kegiatan. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 86,865.13 untuk setiap jumlah peserta Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pubik dan setiap jumlah periode waktu

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNSD	9,49%	2,04%	16,94%
2.	Honorarium Non PNS	6,62%	1,42%	11,82%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	5,95%	1,28%	10,62%
4.	Belanja Bahan/Material	7,16%	1,54%	12,78%
5.	Belanja Jasa Kantor	16,86%	3,62%	30,09%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,82%	0,39%	3,26%
7.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,10%	0,02%	0,18%
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,29%	0,06%	0,52%
9.	Belanja Makanan dan Minuman	4,06%	0,87%	7,24%
10.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1,03%	0,22%	1,85%
11.	Belanja Perjalanan Dinas	42,29%	9,09%	75,49%
12.	Belanja Sewa Perlengkapan , Peralatan Kantor dan	0,76%	0,16%	1,35%
13.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,09%	0,23%	1,94%
14.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	1,54%	0,33%	2,75%
15.	Belanja Barang Yang Akan DiSerahkan Kepada	0,93%	0,20%	1,66%
JUMLAH		100,00%	21,50%	178,50%

Contoh Kegiatan ASB 1.08

No	Satker	Kegiatan
1	SEKRETARIAT DAERAH	Fasilitasi Peningkatan Kadarkum Masyarakat
2	KECAMATAN ENTIKONG	Fasilitasi Penyelenggaraan POR Sosek malindo
3	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi Penyelenggaraan Titian Muhibah

Contoh Kegiatan ASB 1.10

No	Satker	Kegiatan
1	SEKRETARIAT DAERAH	Sosialisasi Raperda dan Perda
2	KECAMATAN TOBA	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
3	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Sosialisasi Pajak Daerah
4	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	Sosialisasi Batas Negara dan Pembinaan Garda Batas
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sosialisasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017
6	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Sosialisasi Pengelolaan Persampahan
7	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
8	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Sosialisasi dan Penilaian Persyaratan Administrasi Bantuan Parpol
9	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sanggau
10	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kab.Sanggau
11	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sosialisasi Uji Kompetensi Guru (UKG)
12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pembinaan Olahraga Prestasi Tenaga Teknis (POR Guru) dan Sosialisasi
13	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Sosialisasi Peraturan Migas
14	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Sosialisasi Hasil Konversi Bahan Galian di Kab.Sanggau
15	SEKRETARIAT DAERAH	Sosialisasi Raperda dan Perda
16	KECAMATAN TOBA	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
17	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kab.Sanggau
18	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Sosialisasi Pasar Kerja
19	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri
21	DINAS KESEHATAN	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
22	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sosialisasi dan Orientasi Hak Reproduksi Remaja

ASB 1.11 PEMBINAAN

Deskripsi Kegiatan:

Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan, penataan dan pendataan pada kader/peserta untuk meningkatkan kemampuan masing-masing per kegiatan untuk kurun waktu satu tahun anggaran.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Orang/Kader dengan jumlah hari

Y = 34,471,290.54 + 306,035.87 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang/Kader dengan jumlah hari
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 34,471,290.54 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan PEMBINAAN (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 34,471,290.54 .
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 306,035.87 Peserta dengan lama hari. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 306,035.87 untuk setiap jumlah Kader/orang Pembinaan dan setiap jumlah hari.

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	7,99%	3,34%	12,64%
2.	Honorarium Non PNS	1,60%	0,67%	2,54%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,86%	1,62%	6,11%
4.	Belanja Bahan/Material	3,34%	1,40%	5,29%
5.	Belanja Jasa Kantor	10,19%	4,26%	16,12%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,72%	1,14%	4,30%
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3,01%	1,26%	4,77%
8.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,14%	2,57%	9,72%
9.	Belanja Makanan dan Minuman	11,16%	4,67%	17,66%
10.	Belanja Perjalanan Dinas	44,08%	18,43%	69,73%
11.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,79%	1,17%	4,41%
12.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	2,39%	1,00%	3,79%
13.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,71%	0,30%	1,12%
	JUMLAH	100,00%	41,81%	158,19%

Contoh Kegiatan ASB 1.11

No	Satker	Kegiatan
1	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pembinaan Pelayanan Angkutan
2	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

No	Satker	Kegiatan
3	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
4	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Pembinaan Usaha Ekonomi Desa
5	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Pembinaan Pasar Kabupaten Sanggau
6	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Penataan dan Pembinaan Pergudangan
7	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Pendataan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
8	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembinaan dan Pendataan LSM, ORMAS dan Orang Asing di Kab.Sanggau
9	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembinaan dan Pendataan Satlinmas di Kab.Sanggau
10	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pembinaan dan Pendataan Kelompok Sadar Wisata di Kab.Sanggau
11	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintah Desa
12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah (POPDA)
13	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa (DID)
14	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Pembinaan lumbung pangan masyarakat
15	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Pengawasan dan Pembinaan Industri Hasil Hutan
16	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Pembinaan lumbung pangan masyarakat
17	SEKRETARIAT DAERAH	Pembinaan dan Penataan Kearsipan
18	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
19	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembinaan dan Pendataan LSM, ORMAS dan Orang Asing di Kab.Sanggau
20	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pembinaan dan Pendataan Satlinmas di Kab.Sanggau
21	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan
22	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pengiriman dan Pemulangan dan Pembinaan mental sosial (Orgil / Stres)
23	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Penataan dan Pembinaan Pergudangan

No	Satker	Kegiatan
24	DINAS PERDAGANGAN, PERDAGANGAN, UKM	PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN Pembinaan Pasar Kabupaten Sanggau
25	DINAS PERDAGANGAN, PERDAGANGAN, UKM	PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
26	DINAS PERDAGANGAN, PERDAGANGAN, UKM	PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERHUBUNGAN, Pembinaan dan Pengawasan Kapal Pedalaman dan Awak Kapal
28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERHUBUNGAN, Pembinaan Pelayanan Angkutan
29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERHUBUNGAN, Pengawasan dan Pembinaan Petugas Parkir dan Terminal
30	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
31	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pembinaan SMP Terbuka
32	DINAS KESEHATAN	Pembinaan Kesehatan dan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
33	BADAN PEREMPUAN, BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN KELUARGA Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
34	BADAN PEREMPUAN, BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	PEMBERDAYAAN KELUARGA Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
35	BADAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	PEMBERDAYAAN Peningkatan Aparatur dan Pembinaan Administrasi Kelurahan
36	BADAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	PEMBERDAYAAN Pembinaan Usaha Ekonomi Desa
37	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan

ASB 1.12 PENYULUHAN MASYARAKAT

Deskripsi Kegiatan:

Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian pemahaman dan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap perkembangan informasi dan pengetahuan terbaru yang diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih baik.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah peserta, frekuensi kegiatan

Y = 84,889,881.4 + 122,860.69 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta, frekuensi kegiatan

- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 84,889,881.4 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan PENYULUHAN KEMASYARAKAT (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 84,889,881.4
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 122,860.69 Orang/Peserta dan frekuensi kegiatan/banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 122,860.69 untuk setiap jumlah peserta Penyuluhan Masyarakat dan setiap jumlah frekuensi kegiatan/banyaknya kegiatan yang dilaksanakan

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata- Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNSD	6,16%	1,33%	10,98%
2.	Honorarium Non PNS	1,12%	0,24%	2,00%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,49%	0,76%	6,23%
4.	Belanja Bahan/Material	2,74%	0,59%	4,89%
5.	Belanja Jasa Kantor	34,51%	7,47%	61,56%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,00%	0,43%	3,56%
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,52%	0,11%	0,93%
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,21%	0,05%	0,38%
9.	Belanja Makanan dan Minuman	14,38%	3,11%	25,64%
10.	Belanja Pakaian kerja	0,88%	0,19%	1,57%
11.	Belanja Perjalanan Dinas	28,64%	6,20%	51,08%
12.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,26%	0,06%	0,47%
13.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	4,22%	0,91%	7,52%
14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,71%	0,15%	1,26%
15.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,16%	0,03%	0,28%
JUMLAH		100,00%	21,64%	178,36%

Contoh Kegiatan ASB 1.12

No	Satker	Kegiatan
1	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Transmigrasi, Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaporan
2	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
3	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin serta relokasi pedagang kakilima dan asongan
4	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyuluhan tentang Pengembangan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Sanggau

No	Satker	Kegiatan
5	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat (PEKAT)
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Bencana
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyuluhan
8	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
9	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Penyusunan Program Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
10	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Peningkatan Kinerja Penyuluh melalui Monitoring dan Pembinaan Kelompok Tani
11	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
12	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan kesehatan anak balita
13	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan Kesehatan bagi ibu Hamil
14	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Bencana
16	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi Transmigrasi, Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaporan
17	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin serta relokasi pedagang kakilima dan asongan
18	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan Kesehatan bagi ibu Hamil
19	DINAS KESEHATAN	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyuluhan

ASB 1.13 KOORDINASI

Deskripsi Kegiatan:

Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya dalam satu tahun anggapan atau periode

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (kegiatan)

Y = 97,746,190.8 + 348,320.34 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang dalam periode waktu tertentu (kegiatan)

- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 97,746,190.8 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan KOORDINASI (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 97,746,190.8
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 348,320.34Orang/Peserta dan periode waktu kegiatan. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 348,320.34 untuk setiap jumlah peserta Koordinasi dan setiap jumlah periode waktu

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut:

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNSD	21,37%	2,86%	39,88%
2.	Honorarium Non PNS	0,48%	0,06%	0,90%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,53%	0,47%	6,58%
4.	Belanja Jasa Kantor	24,21%	3,24%	45,18%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,95%	1,20%	16,71%
6.	Belanja Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Sewa	0,12%	0,02%	0,22%
7.	Belanja Makanan dan Minuman	3,93%	0,53%	7,33%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	28,45%	3,81%	53,09%
9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	8,96%	1,20%	16,73%
JUMLAH		100,00%	13,38%	186,62%

Contoh Kegiatan ASB 1.13

No	Satker	Kegiatan
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
3	SEKRETARIAT DPRD	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
4	SEKRETARIAT DAERAH	Rapat Koordinasi Camat
5	SEKRETARIAT DAERAH	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
6	SEKRETARIAT DAERAH	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
7	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	Koordinasi Pemeliharaan Batas Wilayah Negara
8	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
11	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

No	Satker	Kegiatan
12	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

ASB 1.14 LOMBA

Deskripsi Kegiatan:

Adalah sebuah kegiatan dalam bentuk kegiatan Lomba yang dilakukan di tingkat kecamatan maupun kabupaten dengan melihat jumlah peserta yang akan berkontribusi aktif dalam kegiatan lomba dalam satu tahun anggaran atau periode

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Orang yang mengikuti lomba hari kegiatan

Y = 42,857,803.7 + 344,203.99 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang yang mengikuti lomba hari kegiatan
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 42,857,803.7 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan LOMBA (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 42,857,803.7
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 344,203.99 Peserta lomba dengan lama hari. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 344,203.99 untuk setiap jumlah orang/peserta lomba dan setiap jumlah hari.

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNSD	7,04%	2,75%	11,32%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	2,84%	1,11%	4,58%
3.	Belanja Bahan/Material	22,71%	8,89%	36,53%
4.	Belanja Jasa Kantor	31,18%	12,21%	50,15%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,13%	1,22%	5,03%
6.	Belanja Sewa Rumah /Gedung / Gudang / Parkir	1,94%	0,76%	3,12%
7.	Belanja Makanan dan Minuman	5,25%	2,06%	8,45%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	17,43%	6,82%	28,03%
9.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,53%	0,21%	0,86%
10.	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5,81%	2,28%	9,35%
11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	2,14%	0,84%	3,44%
JUMLAH		100,00%	39,15%	160,85%

Contoh Kegiatan ASB 1.14

No	Satker	Kegiatan
1	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Lomba Kebersihan
2	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Lomba Cerdas Tangkas (LCT) UUD 1945 SMA (DID)
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Lomba Debat Bahasa Inggris dan Indonesia SMA/MA dan SMK (DID)
4	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Lomba Menu 3B dan Aman Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
5	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Lomba Menu 3B dan Aman Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
6	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Lomba Cerdas Tangkas (LCT) UUD 1945 SMA
7	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Lomba Debat Bahasa Inggris SMA
8	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Lomba Sekolah Sehat
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	Lomba Kebersihan

ASB 1.15 MONITORING DAN EVALUSASI

Deskripsi Kegiatan:

Monitoring evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan

Y = 16,025,073.39 + 705,696 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 16,025,073.39 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan MONITORING DAN EVALUSASI (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 16,025,073.39
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 705,696 obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 705,696 untuk setiap jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan/pengawasan Monitoring Dan Evaluasi

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut :

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	5,63%	2,05%	9,20%
2.	Honorarium Non PNS	0,12%	0,04%	0,19%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,33%	0,49%	2,18%
4.	Belanja Jasa Kantor	2,33%	0,85%	3,82%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,26%	0,46%	2,05%
6.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,41%	0,15%	0,67%
7.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0,17%	0,06%	0,28%
8.	Belanja Makanan dan Minuman	0,81%	0,29%	1,32%
9.	Belanja Perjalanan Dinas	43,82%	15,94%	71,70%
10.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43,82%	15,94%	71,70%
11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	0,29%	0,11%	0,48%
JUMLAH		100,00%	36,38%	163,62%

Contoh Kegiatan ASB 1.15

No	Satker	Kegiatan
1	DINAS KESEHATAN	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Monitoring Hidrogeologi
3	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Monitoring dan Evaluasi Distribusi BBM Bersubsidi dan LPG 3 kg
4	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Indikator Ketahan Pangan
5	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PNBP
6	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Monitoring Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kab.Sanggau
7	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Monitoring Penyandang Cacat ASODK Berat dan Pendamping
8	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Monitoring perkembangan harga dan distribusi barang/produk
9	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
10	DINAS PEKERJAAN UMUM	Monitoring, evaluasi dan pelaporan program BSP2S
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Monitoring, evaluasi, Pengendalian dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	Supervisi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Kerja Laku Penyuluh
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Evaluasi Jabatan

ASB 1.16 MUSREMBANG

Deskripsi Kegiatan:

Adalah sebuah kegiatan perencanaan yang ada di daerah pada tingkat RKPD dan musyawarah desa sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan /kebutuhan masyarakat dengan apa yang menjadi program pemerintah.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah Orang yang melaksanakan musrembang

Y = 6,489,404.90 + 85,924 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Orang yang melaksanakan musrembang
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 6,489,404.90 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan MUSREMBANG TINGKAT DESA DAN KECAMATAN (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 6,489,404.90
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 85,924 Peserta musrembang dengan lama hari. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 85,924 untuk setiap jumlah orang/peserta Musrembang Tingkat Desa Dan Kecamatan dan setiap jumlah hari.

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	3,85%	1,15%	6,56%
2.	Honorarium Non PNS	2,04%	0,61%	3,47%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,74%	0,52%	2,96%
4.	Belanja Jasa Kantor	48,28%	14,36%	82,21%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,01%	0,60%	3,43%
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,35%	0,40%	2,31%
7.	Belanja Makanan dan Minuman	14,94%	4,44%	25,44%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	25,78%	7,66%	43,89%
JUMLAH		100,00%	29,73%	170,27%

Contoh Kegiatan ASB 1.16

No	Satker	Kegiatan
1	KECAMATAN MUKOK	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
2	KECAMATAN MELIAU	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
3	KECAMATAN JANGKANG	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
4	KECAMATAN TOBA	Penyelenggaraan musrenbang RPJPD
5	KECAMATAN MUKOK	Penyelenggaraan musrenbang RKPD
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
7	SEKRETARIAT KORPRI	Musyawarah Kabupaten dan Penguatan Pengurus Korpri
8	KECAMATAN PARINDU	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

No	Satker	Kegiatan
9	KECAMATAN NOYAN	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
10	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Musyawah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
11	KECAMATAN TAYAN HILIR	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
12	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Musyawah Adat Dayak Kab.Sanggau Tahun 2015
13	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

ASB 1.17 PENATAAN ADMINISTRASI

Deskripsi Kegiatan:

kegiatan untuk melakukan guna penataan administrasi, keuangan dengan melakukan penertipan tata kelola pada pelaporan dan adminstrasi di instansi pemerintah, per pegiatan dalam satu waktu periode anggaran

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah kegiatan , periode waktu.

Y = 29,318,753.3 + 287,507.14 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah kegiatan , periode waktu.
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 29,318,753.3per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan PENATAAN ADMINISTRASI (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 29,318,753.3
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 287,507.14 banyaknya kegiatan dengan periode waktu. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 287,507.14 untuk setiap jumlah banyaknya kegiatan Penataan Administrasi dan periode waktu

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	28,81%	6,85%	50,77%
2.	Honorarium Non PNS	0,33%	0,08%	0,59%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	22,21%	5,28%	39,15%
4.	Belanja Jasa Kantor	6,56%	1,56%	11,57%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,12%	1,69%	12,54%
6.	Belanja Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Sewa	0,18%	0,04%	0,32%
7.	Belanja Makanan dan Minuman	4,19%	1,00%	7,38%
8.	Belanja Perjalanan Dinas	28,93%	6,88%	50,99%
9.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	1,66%	0,40%	2,93%
JUMLAH		100,00%	23,77%	176,23%

Contoh Kegiatan ASB 1.17

No	Satker	Kegiatan
1	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	Penataan Administrasi Pemerintahan Desa
2	SEKRETARIAT DPR	Penataan Administrasi Kepegawaian SKPD
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Penataan Administrasi Kepegawaian BPKAD Kab. Sanggau
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penataan sistem administrasi mutasi jabatan fungsional
5	SEKRETARIAT DPRD	Penataan Administrasi Kepegawaian SKPD
6	KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	Penataan Administrasi Kepegawaian
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penataan sistem administrasi mutasi jabatan fungsional
8	SEKRETARIAT DPRD	Penatausahaan Keuangan SKPD
9	SEKRETARIAT DAERAH	Penataan/penilaian barang milik daerah, penilaian aset tetap Setda
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penataan Hak-Hak Kepegawaian
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Penataan Hak-Hak Kepegawaian
12	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Penatausahaan Keuangan SKPD
13	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penatausahaan Keuangan SKPD
14	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Penatausahaan Keuangan SKPD
15	SEKRETARIAT DPRD	Penatausahaan Keuangan SKPD
16	DINAS PEKERJAAN UMUM	Penatausahaan Keuangan SKPD

ASB 1.18 PENDATAAN

Deskripsi Kegiatan:

kegiatan untuk melakukan pendataan dengan pengumpulan data informasi di masyarakat, yang bersifat publik yang dapat berbentuk database, per kegiatan dalam satu waktu periode anggaran

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah kegiatan , periode waktu.

Y = 47,490,182.76 + 71,350 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah kegiatan , periode waktu.
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 47,490,182.76 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan PENDATAAN PUBLIK (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 47,490,182.76
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 71,350 banyaknya kegiatan dengan periode waktu. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 71,350 untuk setiap jumlah banyaknya kegiatan Pendataan Publik dan periode waktu

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut :

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	11,15%	1,86%	20,44%
2.	Honorarium Non PNS	3,68%	0,62%	6,75%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	3,93%	0,66%	7,21%
4.	Belanja Bahan/Material	0,90%	0,15%	1,64%
5.	Belanja Jasa Kantor	13,79%	2,30%	25,27%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,42%	0,40%	4,44%
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,14%	0,02%	0,25%
8.	Belanja Makanan dan Minuman	1,22%	0,20%	2,24%
9.	Belanja Perjalanan Dinas	58,22%	9,73%	106,71 %
10.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,55%	0,76%	8,34%
JUMLAH		100,00%	16,72%	183,28 %

Contoh Kegiatan ASB 1.18

No	Satker	Kegiatan
1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERHUBUNGAN, DAN Keatas
2	DINAS PENDAPATAN DAERAH	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah
3	BADAN PERBATASAN	PENGELOLA Pendataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Kawasan Perbatasan
4	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN Perdagangan Ekspor Impor dan Lintas Batas
5	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN Pendataan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
6	BADAN BENCANA DAERAH	PENANGGULANGAN Pendataan dan Penanganan Korban Bencana Alam
7	KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH	KEARSIPAN DAN Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
8	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	PERIKANAN Pendataan masalah peternakan
9	BADAN BENCANA DAERAH	PENANGGULANGAN Pendataan dan Penanganan Korban Bencana Alam
10	BADAN BENCANA DAERAH	PENANGGULANGAN Pendataan Pasca Bencana
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN Pendataan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN Pendataan dan Monitoring UMKM

No	Satker	Kegiatan
13	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Pendataan Ekspor Impor dan Perdagangan Lintas Batas
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Pendataan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
15	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pendataan masalah peternakan

ASB 1.19 PENGAWASAN

Deskripsi Kegiatan:

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang bersifat kepentingan umum.

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan publik

$$Y = 19,870,868.36 + 446,833.63 X$$

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan publik
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 19,870,868.36 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan PENGAWASAN UMUM (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 19,870,868.36
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) : = Rp 446,833.63 obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan publik. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 446,833.63 untuk setiap jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan publik Pengawasan Umum

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	2,39%	1,52%	3,27%
2.	Honorarium Non PNS	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,53%	0,97%	2,09%
4.	Belanja Bahan/Material	0,03%	0,02%	0,03%
5.	Belanja Jasa Kantor	1,56%	0,99%	2,14%
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,37%	0,87%	1,88%
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,12%	0,08%	0,16%
8.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,31%	0,20%	0,42%
9.	Belanja Makanan dan Minuman	1,71%	1,08%	2,34%
10.	Belanja Perjalanan Dinas	88,83%	56,25%	121,42%
11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	2,15%	1,36%	2,93%
JUMLAH		100,00%	63,32%	136,68%

Contoh Kegiatan ASB 1.19

No	Satker	Kegiatan
1	INSPEKTORAT	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
2	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
3	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
4	DINAS KESEHATAN	Pengawasan kualitas air dan lingkungan depot air minum
5	DINAS KESEHATAN	Pengawasan kualitas makanan dan hygiene sanitasi TPM (Tempat Pengolahan Makanan)
6	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Pengawasan dan Pembinaan Industri Hasil Hutan
7	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
8	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengawasan dan Pembinaan Petugas Parkir dan Terminal
9	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengawasan pemanfaatan ruang
10	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah
11	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Pengawasan dan Pembinaan Industri Hasil Hutan

ASB 1.20 PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA KECAMATAN

Deskripsi Kegiatan:

administrasi kecamatan untuk peningkatan pelayanan prima hal ini banyaknya SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan, yang dilaksanakan untuk satu periode tahun

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah SDM dalam periode tahun anggaran

Y = 13,363,111.71 + 118,484.62 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah SDM dalam periode tahun anggaran.
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 13,363,111.71 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA KECAMATAN (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 13,363,111.71
- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 118,484.62orang/SDM dengan periode waktu. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 118,484.62 untuk setiap jumlah orang Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan dan periode waktu anggaran

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut ;

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	93,44%	59,32%	127,56%
2.	Honorarium Non PNS	3,96%	2,51%	5,41%
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,45%	0,28%	0,61%
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,15%	1,37%	2,94%
JUMLAH		100,00%	63,49%	136,51%

Contoh Kegiatan ASB 1.20

No	Satker	Kegiatan
1	KECAMATAN TAYAN HILIR 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)
2	KECAMATAN SEKAYAM 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)
3	KECAMATAN PARINDU 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)
4	KECAMATAN MUKOK 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)
5	KECAMATAN MELIAU 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)
6	KECAMATAN KEMBAYAN 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)
7	KECAMATAN JANGKANG 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)
8	KECAMATAN BONTI 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)
9	KECAMATAN BEDUAI 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)
10	KECAMATAN BALAI 2016	Peningkatan Pelayanan Prima Kecamatan (PATEN)

ASB 1.21 PENYELENGGARAAN**Deskripsi Kegiatan:**

kegiatan untuk melakukan Penyelenggaraan atau melakukan kegiatan yang bersifat menciptakan sesuatu aktifitas peningkatan kualitas dan penambahan nilai, per kegiatan dalam satu waktu periode anggaran

Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan:

X = Jumlah kegiatan , periode waktu.

Y = 84,000,118.67 + 97,493.11 X

- Pengendali belanja (cost driver): Jumlah kegiatan, periode waktu.
- Satuan Pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 84,000,118.67 per kegiatan. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan. Untuk melaksanakan kegiatan PENYELENGGARAAN AKTIVITAS (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 84,000,118.67

- Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 97,493.11 banyaknya kegiatan dengan periode waktu. Artinya : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 97,493.11 untuk setiap jumlah kegiatan Penyelenggaraan Aktivitas dan periode waktu

Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja:

Adapun nilai total belanja akan didistribusikan berdasarkan objek belanja sebagai berikut :

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Bawah	% Batas Atas
1.	Honorarium PNS	6,36%	1,88%	10,84%
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,17%	0,35%	1,99%
3.	Belanja Bahan/Material	2,28%	0,67%	3,88%
4.	Belanja Jasa Kantor	22,94%	6,78%	39,10%
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45,11%	13,33%	76,89%
6.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,11%	0,03%	0,19%
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,79%	0,53%	3,04%
8.	Belanja Makanan dan Minuman	2,37%	0,70%	4,03%
9.	Belanja Perjalanan Dinas	15,36%	4,54%	26,19%
10.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,26%	0,08%	0,45%
11.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber / Instruktur	0,93%	0,28%	1,59%
12.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi	1,33%	0,39%	2,26%
JUMLAH		100,00%	29,55%	170,45%

Contoh Kegiatan ASB 1.21

No	Satker	Kegiatan
1	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengendalian Penyelenggara Jasa Pos dan Telekomunikasi
2	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN	Penyelenggaraan promosi investasi dan pameran pembangunan
3	SEKRETARIAT DAERAH	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Terpadu (e-Office)
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
6	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaran US SMA & SMK
7	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaran US, SMP Dan Mts
8	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
9	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
10	SEKRETARIAT DAERAH	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
11	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN	Penyelenggaraan promosi investasi dan pameran pembangunan

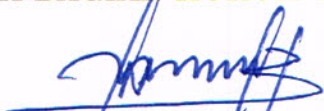
No	Satker	Kegiatan
12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggarakan US, SMP Dan Mts
13	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
14	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
15	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaraan paket C setara SMU
16	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaran US SMA & SMK
17	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
18	DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
19	BADAN PENGELOLA PERBATASAN	Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**



YAKOBUS. SH, MH
Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002